

Judul : DPD Usul Enam RUU Masuk Prolegnas
Tanggal : Selasa, 13 Nopember 2018
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 2



PARIPURNA-
Pimpinan DPD RI
Nono Sampono,
Akhmad
Muqowam, dan
Darmayanti
Lubis memimpin
Pembukaan Masa
Sidang II Tahun
Sidang 2018-2019,
Senin (12/11).

CHARLIE LOPULLA/INDOPOS

DPD Usul Enam RUU Masuk Prolegnas

JAKARTA-DPD RI akan usulkan 6 Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas pada Prolegnas 2019. Hal tersebut terungkap pada Sidang Paripurna ke-6 Masa Sidang II tahun 2018-2019 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/11).

RUU Prolegnas Prioritas yang akan diselesaikan DPD RI antara lain, RUU tentang Pengelolaan Kawasan Daerah Perbatasan, RUU tentang Keg- eologian, RUU tentang Perlindungan Varietas Tanaman, RUU tentang Bahasa Daerah, RUU tentang Peng- urusan Piutang Negara dan Piutang

Daerah, RUU tentang Perubahan atas UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pada Sidang ini dilaporkan juga bahwa masa Sidang 2018-2019, Komite I akan melakukan finalisasi RUU inisiatif DPD RI tentang Percepatan Pembangunan daerah tertinggal. Selain itu, Komite I akan melakukan pembahasan bersama DPR dan Pemerintah terkait RUU tentang Daerah Kepulauan dan RUU tentang Masya- rakat Hukum Adat; Sedangkan Komite II akan melakukan pembahas- an Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU BUMN dan melakukan

Pengawasan atas Undang-Undang Penerbangan; Sedangkan Komite III akan melakukan inventarisasi materi RUU perubahan UU Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan tentang Kepemudaan; dan Komite IV akan melanjutkan pe- nyusunan pandangan dan pendapat terhadap RUU dari DPR/pemerintah terkait RUU tentang Konsultan Pa- jak, dan review terhadap APBN 2019.

"Saya berharap semua alat keleng- kapan dapat menggunakan waktu secara efektif dan efisien, selain itu harus dapat menyusun setiap agenda yang sesuai untuk dapat menyele-

saikan tugas dan kewenangan yang sudah disusun," ujar Nono Sampono, Wakil Ketua DPD RI.

Nono juga mengingatkan kepada alat kelengkapan DPD RI dan ang- gota untuk fokus menyelesaikan semua tugas dan kewenangan DPD RI terutama Program Legislasi Na- sional pada Masa Sidang tahun 2018-2019 yang sangat singkat. "Saya sampaikan masa Sidang ta- hun 2018-2019 ini sangat singkat, akan tetapi semua alat kelengkap- an harus mampu menyelesaikan semua agenda yang ada sesuai deng- an tugas dan kewenangan ter-

utama dalam bidang legislasi," ujar Senator Maluku tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU), John Pieris menyatakan bahwa pada masa sidang 2018-2019 DPD akan fokus mengerjakan enam RUU pada Prolegnas Prioritas 2019. "Kami mendorong adanya sosiali- sasi dan penyebarluasan program prolegnas yang dikerjakan oleh DPD RI. Hasil kesepakatan Tripartit antara DPD, DPR, dan Pemerintah perlu disosialisasikan ke daerah oleh PPUU 2019 mendatang," ujar John Pieris. (aen)